



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 7, No. 1 Tahun 2024

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v7i1.24565>

Sejarah Nasionalisme Arab: Revolusi Gamal Abdul Nasser dan Implikasinya pada Mesir Modern

Safna Putri Purba

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
safnaputri19@gmail.com

Amany Burhanuddin Umar Lubis

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Amany.lubis@uijkt.ac.id

Mulawarman Hannase

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
m.hannase@yahoo.com

Mohammad Izdiyan Muttaqin

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
presiden.izdiyan@gmail.com

Submitted: December 23th, 2023

Revised: June 26th, 2024

Accepted: August 16th, 2024

Abstract

This study aims to explore the impact of Arab Nationalism in Middle Eastern history, with a particular focus on the role played by Gamal Abdul Nasser. The research method involves an in-depth historical analysis of the development of Arab Nationalism under Nasser's leadership, by examining the key speeches, policies, and actions that shaped the direction of the movement. The main arguments of this study include the ability of Nasser's Arab Nationalism to mobilize support and lead the revolution in Egypt. Key factors, such as the struggle against colonialism, advocacy of social justice, and efforts to build a unified national identity, are the focus of the analysis. Research also explores the impact of Arab Nationalism on a regional level, noting the controversies and debates surrounding the exclusive nature of the movement. Overall, the study proposes that Arab Nationalism under Nasser's leadership not only played a role as a historical symbol, but also as a transformational force shaping political and cultural identity in the Middle East. The results

of the study are expected to provide in-depth insights into the legacy of Arab Nationalism and its impact on political and social dynamics in the region.

Keywords: Arab Nationalism, Egypt, Gamal Abdul Nasser

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak Nasionalisme Arab dalam sejarah Timur Tengah, dengan fokus khusus pada peran yang dimainkan oleh Gamal Abdul Nasser. Metode penelitian melibatkan analisis historis mendalam terhadap perkembangan Nasionalisme Arab di bawah kepemimpinan Nasser, dengan memeriksa pidato, kebijakan, dan tindakan kunci yang membentuk arah gerakan tersebut. Argumentasi utama penelitian ini mencakup kemampuan Nasionalisme Arab yang digagas oleh Nasser dalam memobilisasi dukungan dan memimpin revolusi di Mesir. Faktor-faktor kunci, seperti perjuangan melawan kolonialisme, advokasi keadilan sosial, dan upaya untuk membangun identitas kebangsaan yang bersatu, menjadi fokus analisis. Penelitian juga mengeksplorasi dampak Nasionalisme Arab pada tingkat regional, memperhatikan kontroversi dan perdebatan seputar sifat eksklusif gerakan ini. Dalam keseluruhan, penelitian ini mengusulkan bahwa Nasionalisme Arab di bawah kepemimpinan Nasser tidak hanya memainkan peran sebagai simbol sejarah, tetapi juga sebagai kekuatan transformasional yang membentuk identitas politik dan budaya di Timur Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang warisan Nasionalisme Arab dan dampaknya terhadap dinamika politik dan sosial di kawasan tersebut, khususnya untuk Mesir.

Kata kunci: Nasionalisme Arab, Gamal Abdul Nasser, Mesir

Pendahuluan

Sebagai kawasan yang kaya akan sejarah dan budaya, dunia Arab telah lama menjadi panggung bagi perjalanan peradaban yang membangun identitasnya. Sentimen bersama terkait bahasa, agama, dan sejarah telah memunculkan semangat kolektif yang mencetuskan gerakan Nasionalisme Arab. Gerakan Nasionalis Arab, yang berpengaruh di sebagian besar dunia Arab tak terkecuali di Mesir. Nasionalisme Arab, sebuah ideologi politik yang menganjurkan persatuan orang Arab sebagai bangsa tunggal, mencakup visi multifaset yang melampaui batas-batas teritorial belaka. Berakar pada komitmen kuat untuk mempromosikan budaya Arab, peradaban, sejarah, dan bahasa Arab, ia bercita-cita untuk menghidupkan kembali dan menyegarkan masyarakat Arab melalui konsolidasi komprehensif dari beragam komponennya. Munculnya ideologi ini pada abad ke-19 dan ke-20 dibuka sebagai respons reaktif terhadap perambahan dominasi

Eropa dan momok kolonialisme yang menjulang di seluruh dunia Arab. Dipelopori terutama oleh elit perkotaan yang berpendidikan, nasionalisme Arab berkembang menjadi kekuatan ideologis yang dominan di dunia Arab timur, memegang pengaruh yang cukup besar sepanjang sebagian besar abad ke-20 (Aziz, 2009).

Asal-usul nasionalisme Arab dapat ditelusuri ke titik sejarah yang ditandai oleh penurunan Kekaisaran Ottoman, disintegrasi struktur kekuasaan tradisional, dan perambahan kekuatan Barat setelah Perang Dunia I. Periode yang bergejolak ini memacu keinginan kolektif di antara orang-orang Arab untuk menegaskan identitas mereka dan menolak kontrol eksternal, sehingga menimbulkan sentimen nasionalis yang kuat yang berusaha menyatukan wilayah-wilayah Arab yang berbeda di bawah panji bersama. Intelektual terdidik memainkan peran penting dalam memelihara dan menyebarkan cita-cita nasionalis Arab, memanfaatkan sastra, akademis, dan wacana politik untuk menempa rasa identitas bersama di antara populasi Arab yang beragam. Ideologi ini menemukan lahan subur di kancah intelektual kota-kota besar, di mana diskusi tentang persatuan nasional, kebangkitan budaya, dan kemerdekaan politik berkembang. Nasionalisme Arab, oleh karena itu, menjadi seruan bagi mereka yang berusaha mengatasi fragmentasi yang disebabkan oleh perbatasan era kolonial dan campur tangan eksternal. Sepanjang sebagian besar abad ke-20, nasionalisme Arab berfungsi sebagai narasi menyeluruh yang membentuk lanskap politik dunia Arab timur. Ini dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, mempengaruhi gerakan politik, pemerintah, dan konflik (Antonius, 1961).

Pemimpin seperti Gamal Abdul Nasser di Mesir memeluk dan menyebarkan cita-cita nasionalisme Arab, berusaha untuk menjalin aliansi dan menumbuhkan solidaritas di antara negara-negara Arab. Namun, terlepas dari pengaruh historisnya, lanskap ideologis nasionalisme Arab telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tantangan terus-menerus dari konflik regional, perselisihan internal, dan dinamika geopolitik global yang berkembang telah mengungkap keterbatasan front Arab yang bersatu. Tidak adanya kepemimpinan yang kohesif dan berkelanjutan,

ditambah dengan kompleksitas kepentingan nasional yang beragam, telah menyebabkan fragmentasi narasi nasionalis Arab yang dulu dominan.

Transformasi politik di Mesir sebelum dan sesudah Gamal Abdul Nasser mencerminkan perubahan signifikan dalam peta politik negara tersebut. Sebelum Nasser, dari tahun 1922 hingga 1952, Mesir meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1922 dan menerapkan konstitusi parlementer pada tahun 1923, memberikan kebebasan sipil yang luas. Namun, pada tahun 1952, kudeta yang dipimpin oleh Perwira Gerakan Bebas, termasuk Nasser, mengakhiri rezim monarki dan memulai era kepemimpinan militer. Sesudah Nasser, dari tahun 1952 hingga 1970-an, Mesir mengalami transformasi politik signifikan dengan diperkenalkannya sistem politik sosialis yang menekankan pada aliran kiri dan penghapusan pluralisme politik yang ada (Shehata, 2018). Nasser memimpin dengan latar belakang militer dan melarang kelompok oposisi dari spektrum Islamis maupun kiri (Samir & Basyar, 2022). Pada tahun 1970-an, setelah kematian Nasser, Anwar Sadat mengambil alih kepemimpinan Mesir dan mengubah arah kebijakan politik, ekonomi, dan luar negerinya menuju liberalisme.

Revolusi Mesir yang dibawakan oleh Gamal Abdul Nasser menjadi salah satu sejarah kemenangan Mesir dalam melawan imperialisme. Kebijakan Gamal Abdul Nasser meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di Mesir dan dunia Arab yang lebih luas selama masa kepresidenannya, mulai dari tahun 1956 hingga 1970. Kepemimpinan Nasser ditandai dengan komitmen untuk mengubah Mesir menjadi negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Salah satu pilar utama pendekatannya adalah inisiasi sistem komprehensif yang memfasilitasi pembangunan politik dan kerja sama fiskal untuk mengangkat negara. Dalam upaya untuk membangun struktur politik yang selaras dengan visinya untuk Mesir, Nasser memperkenalkan konsep 'demokrasi terpimpin.' Sistem ini, sambil mempertahankan lapisan proses demokrasi, dicirikan oleh otoritas pusat yang kuat, di mana Nasser memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memandu lanskap politik ke arah yang akan melayani kepentingan bangsa seperti yang dibayangkan oleh Nasser sendiri.

Secara ekonomi, Nasser berusaha mengatasi tantangan Mesir melalui strategi industrialisasi. Menyadari kebutuhan akan swasembada ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal, Nasser bertujuan untuk membangun basis industri yang kuat di dalam negeri. Dorongan industrialisasi dipandang sebagai solusi untuk kesengsaraan ekonomi Mesir, memberikan kesempatan kerja, mendorong kemajuan teknologi, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Kebijakan Nasser didukung oleh komitmen kuat terhadap nasionalisme Arab. Dia secara aktif menentang pengaruh kolonial dan imperialistik di dunia Arab, mengadvokasi persatuan negara-negara Arab. Visi Pan-Arabisnya berusaha menciptakan entitas politik dan ekonomi yang bersatu di antara negara-negara Arab, membayangkan suara kolektif yang lebih kuat di panggung global. Selain itu, kepemimpinan Nasser mencerminkan unsur-unsur populis dan karismatik. Hubungannya dengan massa dibangun di atas narasi menantang pengaruh asing, mengadvokasi keadilan sosial, dan mempromosikan rasa kebanggaan nasional. Karisma dan popularitas Nasser berperan penting dalam memobilisasi dukungan publik untuk kebijakannya. Sementara inisiatif Nasser, seperti nasionalisasi Terusan Suez pada tahun 1956, disambut dengan pujian dan kritik, dampak keseluruhannya terhadap sejarah modern Mesir tidak dapat disangkal. Proyek-proyek yang dimulai selama masa kepresidenannya, termasuk proyek ambisius Aswan High Dam, melambangkan komitmennya terhadap modernisasi dan pembangunan infrastruktur (Ali, 2022).

Perkembangan Mesir yang memiliki Sejarah yang dipimpin oleh sosok berlatar belakang militer juga tidak terlepas dari pengaruh Gamal Abdul Nasser. Di bawah Nasser, militer menjadi institusi sentral dalam politik Mesir. Meskipun militer tidak secara langsung memerintah negara ini, pengaruhnya sangat luas. Banyak pejabat tinggi dan posisi pemerintahan dipegang oleh mantan perwira militer, sehingga memastikan bahwa kepentingan militer terwakili dalam peran penting dalam pengambilan keputusan. Pengaturan ini berlanjut bahkan setelah kematian Nasser, dengan presiden-

presiden berikutnya, termasuk Anwar El-Sadat dan Hosni Mubarak, juga memiliki latar belakang militer (Ottaway, 2022).

Sebelumnya, dalam Penelitian milik Muhammad Nurudin berjudul "Pemikiran Nasionalisme Arab Gamal Abden Nasser dan Implikasinya Terhadap Persatuan Umat Islam di Mesir" telah mengkaji bagaimana peran dan pengaruh Gamal Abdul Nasser, khususnya dalam memperkuat nasionalisme Arab dan dampak kebijakannya terhadap Mesir dan dunia Arab (Altun, 2022). Namun penelitian ini berfokus pada era dimana konflik antara nasionalisme dan ukhuwah Islamiyyah menyebabkan ketidakstabilan di Mesir terjadi. Penelitian ini memiliki relevansinya terletak pada analisis kepemimpinan Nasser dan pengaruh jangka panjang kebijakannya. Namun yang menjadi pembedanya adalah bahwa penelitian baru ini dapat mengeksplorasi lebih lanjut dampak struktural dan kebijakan Nasser terhadap perkembangan politik dan masyarakat Mesir saat ini, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang kesinambungan dan perubahan sejak era kepemimpinan Nasser.

Dalam pembahasan mengenai Nasionalisme Arab juga sebelumnya dibahas oleh Hadza Min Fadhli tentang nasionalisme Arab membahas perkembangan sejarahnya secara umum, dengan fokus pada perlawanan terhadap kekuasaan Turki dan Usmani serta kebangkitan gerakan nasionalis dan intelektual Arab (Robby, 2020). Penekanannya terutama pada masa keemasan nasionalisme Arab di bawah kepemimpinan Gamal Abdul Nasser dan penurunan popularitasnya setelah kekalahan dalam perang dengan Israel. Meski sudah secara komprehensif membahas mengenai Nasionalisme Arab, namun penelitian yang akan diangkat oleh penulis lebih fokus pada analisis revolusi Nasser dan dampaknya yang lebih mendalam terhadap perkembangan politik, sosial, dan keagamaan Mesir modern. Ini mencakup juga evaluasi terhadap warisan Nasser dalam konteks saat ini dan bagaimana perubahan struktural yang dihasilkan mempengaruhi masyarakat Mesir secara lebih luas.

Ideologi nasionalis menghadapi tantangan di abad ke-21 karena globalisasi, migrasi, dan diaspora, mengubah konsep negara-bangsa tradisional. Interaksi antara

nasionalisme dan 'tantangan kosmopolitan,' termasuk regionalisasi dan globalisasi, sangat kompleks. Adaptasi termasuk mendefinisikan kembali penentuan nasib sendiri dan memanfaatkan integrasi regional untuk otonomi. Dampak globalisasi terhadap nasionalisme bervariasi, dengan beberapa melihatnya sebagai ancaman dan yang lain sebagai peluang. 'Tantangan kosmopolitan' melibatkan regionalisasi, globalisasi, migrasi, transnasionalisme, dan diaspora, yang mempengaruhi identitas nasional. Meskipun ada tantangan, nasionalisme tetap fleksibel, beradaptasi dengan politik kontemporer dan berkontribusi pada perkembangannya yang berkelanjutan (Sutherland, 2012). Semangat nasionalisme yang dibawa oleh Gamal Abdul Nasser hingga saat ini membekas di tanah Mesir. Dalam tulisan ini akan mengkaji secara historis bagaimana Nasionalisme Arab yang dibawakan oleh Gamal Abdul Nasser yang berakar dari Mesir hingga tersebar luas di penjuru negara Timur Tengah. Tulisan ini juga akan mengeksplorasi implikasinya terhadap Mesir hingga kini dengan mengangkat pertanyaan penelitian yakni, “Bagaimana warisan nasionalisme Arab Gamal Abdul Nasser masih berdampak pada politik Mesir saat ini?”

Kerangka Teori

Nasionalisme

Nasionalisme, sebagai ideologi dan gerakan, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik dengan menekankan kesetiaan dan pengabdian individu kepada bangsa mereka. Konsep ini menegaskan bahwa bangsa harus selaras dengan negara, mengadvokasi kepentingan bangsa tertentu sambil berusaha untuk melestarikan kedaulatan dan budaya tradisionalnya. Akar nasionalisme sebagai kekuatan yang diakui dalam sejarah modern dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-18, dan esensinya terletak pada keyakinan bahwa bangsa adalah satu-satunya sumber kekuatan politik yang sah. Inti dari ideologi nasionalis adalah gagasan bahwa bangsa berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, dan identitasnya harus sesuai dengan identitas negara. Ini

memerlukan mempromosikan hubungan yang kuat antara entitas politik dan elemen budaya, sejarah, dan etnis yang mendefinisikan bangsa.

Nasionalisme sering memanifestasikan dirinya melalui berbagai faktor seperti ikatan budaya, etnis bersama, bahasa yang sama, dan narasi sejarah kolektif. Dalam banyak kasus, ini melibatkan kesadaran nasional yang mendalam, mengangkat bangsa seseorang di atas semua yang lain. Dampak nasionalisme melampaui wacana politik belaka; Ini mempengaruhi dinamika sosial, membentuk sentimen publik, dan menginformasikan kebijakan. Semangat nasionalistik dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam memobilisasi populasi, menumbuhkan rasa persatuan, dan menghasilkan kebanggaan kolektif. Namun, ia juga memiliki potensi untuk membiakkan kecenderungan eksklusif, menumbuhkan mentalitas 'kita versus mereka' yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antara berbagai negara. Di zaman kontemporer, nasionalisme terus menjadi kekuatan dinamis yang membentuk lanskap geopolitik. Pengaruhnya terbukti dalam perdebatan seputar imigrasi, kebijakan perdagangan, dan hubungan internasional. Negara-negara bergulat dengan keseimbangan antara menegaskan kedaulatan mereka dan terlibat dalam kerja sama global. Memahami sifat multifaset nasionalisme sangat penting untuk menavigasi tantangan kompleks yang muncul di persimpangan identitas nasional, keterkaitan global, dan pengejaran kesejahteraan kolektif (Miscevic, 2001).

Nasionalisme dan patriotisme, sering digunakan secara bergantian, adalah konsep yang mewujudkan perbedaan yang berbeda dalam karakteristik inti dan implikasinya. Pada intinya, keduanya melibatkan rasa bangga di negara seseorang, tetapi nuansa mereka mengungkapkan orientasi yang beragam. Nasionalisme didefinisikan oleh kesetiaan dan pengabdian yang mendalam kepada bangsa seseorang, menekankan pentingnya kepentingan dan identitas budaya bangsa tertentu. Penekanan ini kadang-kadang dapat menyebabkan eksklusivitas, mendukung satu kelompok identitas atas yang lain dan, dalam kasus tertentu, menumbuhkan sikap dalam oposisi langsung terhadap mereka. Nasionalisme, pada dasarnya, dapat menyiratkan kecurigaan atau

bahkan penghinaan terhadap negara lain, menggambarkan mereka sebagai saingan. Selain itu, sentimen yang terkait dengan nasionalisme cenderung lebih condong ke arah agresi dan konfrontasi dengan negara lain.

Sebaliknya, patriotisme melampaui batas-batas nasional belaka, mencakup cinta dan pengabdian kepada seluruh negara, termasuk semua penduduknya. Tidak seperti nasionalisme, patriotisme dicirikan oleh pendekatan yang lebih inklusif, dengan fokus pada kesejahteraan seluruh negara dan populasinya yang beragam. Patriotisme terbuka untuk kritik, mengakui dan memahami kekurangan negara seseorang. Alih-alih membenarkan kesalahan masa lalu, penekanannya terletak pada membuat perbaikan konstruktif. Inklusivitas patriotisme sangat kontras dengan eksklusivitas yang sering dikaitkan dengan nasionalisme. Sementara nasionalisme dapat meningkatkan satu kelompok identitas di atas yang lain, patriotisme mengakui persatuan semua warga negara dalam suatu negara. Patriotisme menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan kolektif bangsa, mempromosikan lingkungan yang kooperatif dan harmonis. Selain itu, orientasi terhadap negara lain adalah titik kunci diferensiasi (Holzer et al., 2023).

Nasionalisme memberikan dampak besar pada hubungan internasional, mempengaruhi dinamika konflik dan stabilitas global. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan intensitas perang dengan meningkatkan kemampuan mobilisasi negara dan menumbuhkan semangat pertahanan diri, sehingga meningkatkan kemungkinan konflik antar negara. Munculnya nasionalisme menimbulkan tantangan bagi keamanan internasional, mendorong negara-negara untuk berbalik ke dalam dan berkontribusi terhadap fragmentasi ekonomi dan politik. Selain itu, nasionalisme dapat memiliki efek merugikan pada kerja sama internasional dengan mempromosikan identifikasi dan pencemaran nama baik 'orang lain.' Hal ini dapat mengakibatkan asumsi strategis yang bias dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 'menawar perang nasionalis' di kalangan elit, yang mengarah pada konflik kekerasan dan merusak efektivitas lembaga-lembaga internasional dalam mempromosikan perdamaian. Bentuk-bentuk nasionalisme

ekstrem, ketika terkait dengan politik, dapat menimbulkan fasisme dan isolasionisme, mendorong diskriminasi dan berpotensi memicu insiden kekerasan. Ketika nasionalisme mengalami kebangkitan global, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tren ini dapat berkontribusi pada peningkatan konflik mematikan, menjadikan nasionalisme sebagai faktor yang signifikan dan menantang dalam politik internasional kontemporer (Powers, 2022).

Dalam era modern ini, nasionalisme diartikan dengan cara yang lebih kompleks dibandingkan masa lalu, terutama karena pengaruh globalisasi. Globalisasi membuat dunia terasa lebih kecil dan tanpa batas, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang maju dan aliran berita serta informasi yang instan, menciptakan ilusi, dan kadang-kadang realitas, komunitas global. Hal ini membuat identitas nasional menjadi kurang jelas bagi sebagian orang, yang berpendapat bahwa globalisasi mengurangi pentingnya nasionalisme. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa globalisasi justru mempengaruhi bentuk nasionalisme. Nasionalisme di era globalisasi dapat terlihat dalam dua bentuk utama (Dugis, 1999). Pertama, etnonasionalisme, di mana identifikasi diri dan kelompok kecil menjadi lebih kuat, dengan banyaknya gerakan sentrifugal dari kelompok etnis, agama, atau bahasa. Nasionalisme ini berfokus pada kesadaran lokal, etnis, atau kelompok. Kedua, supranasionalisme, yaitu tren di mana orang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari budaya dunia, melampaui batas-batas negara-bangsa. Ernest Gellner berpendapat bahwa nasionalisme adalah prinsip politik yang menghubungkan unit politik dan unit nasional. Nasionalisme bisa berupa sentimen atau gerakan, dan memiliki akar sosial dalam organisasi masyarakat industri (Gellner, 1981).

Eugene Kamenka mengemukakan bahwa nasionalisme adalah fenomena kompleks yang berkembang dari kesadaran kelompok dalam sejarah Eropa, terutama setelah Revolusi Perancis yang memberikan signifikansi politik baru pada nasionalisme (Kamenka, 1976). John Plamenatz mendefinisikan nasionalisme sebagai keinginan untuk mempertahankan atau meningkatkan identitas nasional atau budaya, dan sering muncul ketika orang merasa dirugikan secara budaya. Hugh Seton-Watson memperkenalkan dua

makna nasionalisme, yaitu sebagai doktrin tentang karakter, hak, dan kewajiban bangsa, dan sebagai gerakan politik terorganisir. John Breuilly lebih menekankan nasionalisme sebagai bentuk politik, dengan fokus pada bagaimana nasionalisme terkait dengan tujuan memperoleh dan menggunakan kekuasaan negara. Sementara itu, Anthony D. Smith berpendapat bahwa nasionalisme memiliki hubungan erat dengan modernisasi, dan penting untuk memahami konteks waktu, ruang, dan bentuk nasionalisme (A. D. Smith, 1987).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif guna menyelidiki fenomena nasionalisme Arab, dengan fokus khusus pada Studi Kasus Revolusi oleh Gamal Abdul Nasser dan implikasinya terhadap Mesir dalam era modern. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran nasionalisme Arab dalam mengubah dinamika sosial dan politik Mesir pada periode tersebut. Sumber data utama penelitian ini akan melibatkan analisis dokumen dan interpretasi konten dari pidato-pidato Nasser, artikel sejarah, serta analisis literatur ilmiah yang relevan dengan periode revolusi dan pemerintahan Nasser. Metodologi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola sentral, konsep, dan narasi yang muncul dari sumber-sumber tersebut, memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang peran Nasser dalam membangun dan mengartikulasikan nasionalisme Arab di Mesir. Teknik analisis konten akan digunakan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tema-tema kunci, sementara klasifikasi dan kategorisasi akan membantu mengorganisir informasi yang ditemukan. Pendekatan interpretatif akan diterapkan untuk mengungkap makna dan implikasi dari nasionalisme Arab yang diusung oleh Nasser, memberikan konteks yang mendalam terkait sejarah dan perkembangan Mesir pada masa tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Nasionalisme Arab

Nasionalisme Arab, ideologi politik yang menempatkan persatuan orang Arab sebagai bangsa tunggal, melampaui batas-batas geografis dan politik, menekankan warisan bersama budaya, peradaban, sejarah, dan bahasa Arab. Berasal pada awal abad ke-20 dalam perpaduan kompleks Kekaisaran Ottoman, nasionalisme Arab berkembang menjadi kekuatan yang signifikan, mendapatkan momentum selama Perang Dunia Pertama dan meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada lanskap geopolitik berikutnya di Timur Tengah (Wien, 2017).

Pada akhir abad ke-19, khususnya dari tahun 1860-an dan seterusnya, kalangan intelektual di Levant dan Mesir mulai menumbuhkan rasa kesetiaan kepada 'Tanah Air'. Namun, kesetiaan ini tidak selalu memerlukan konsep terpadu tentang 'Tanah Air Arab'. Sebaliknya, itu berasal dari pengamatan keberhasilan teknologi Eropa Barat, yang oleh para intelektual dikaitkan dengan prevalensi patriotisme di negara-negara tersebut. Munculnya sentimen ini bertepatan dengan masuknya misionaris Kristen dan pendidik dari Barat, berkontribusi pada apa yang disebut 'kebangkitan politik Arab' dan pembentukan masyarakat rahasia di dalam Kekaisaran Ottoman. Gerakan intelektual ini mendapatkan momentum melalui perluasan jurnalisme yang memanfaatkan bahasa Arab pemersatu. Pembuatan surat kabar dalam bahasa Arab, bersama dengan penerbitan kamus dan ensiklopedia Arab pada akhir 1860-an dan awal 1870-an, memainkan peran penting dalam mempertanyakan kekuatan Ottoman, meskipun dalam kapasitas terbatas (Khalidi et al., 1991).

Selama periode ini, literatur yang diproduksi di Mashriq (Levant dan Mesopotamia) di bawah kendali Ottoman mengungkapkan intensitas emosional dan kecaman keras terhadap Turki Ottoman atas apa yang dianggap sebagai 'mengkhianati Islam' dan Tanah Air ke Barat Kristen. Patriot Arab berpendapat bahwa Islam tidak selalu berada dalam 'keadaan menyesal' dan menghubungkan kemenangan militer dan kemuliaan budaya orang-orang Arab dengan munculnya agama. Mereka bersikeras bahwa modernisme

Eropa sendiri memiliki asal-usul Islam. Di mata para patriot ini, Ottoman telah menyimpang dari Islam sejati, yang menyebabkan kemunduran mereka. Upaya reformasi pemerintah Ottoman dan Mesir dikritik karena mencoba mengadopsi praktik-praktik Barat yang dianggap tidak wajar dan korup. Menurut patriot Arab, solusinya terletak pada menghidupkan kembali Islam sejati, yang akan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan perwakilan konstitusional dan kebebasan. Sementara konsep-konsep ini memiliki asal-usul Islam, mereka diyakini telah dimanifestasikan di Barat selama era itu. Gerakan intelektual dan ekspresi sastra periode ini meletakkan dasar bagi sentimen nasionalis Arab yang berkembang yang akan membentuk lanskap politik dalam beberapa dekade berikutnya (Aziz, 2009).

Pada akhir abad ke-19, interaksi yang kompleks antara Arabisme dan patriotisme regional, khususnya di Mesir dan Levant, secara bertahap membayangi Ottomanisme di antara orang-orang Arab tertentu di Suriah dan Lebanon. Pergeseran ini ditandai oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Ibrahim al-Yaziji, seorang filsuf Kristen Lebanon, yang, pada tahun 1868, menyerukan orang-orang Arab untuk merebut kembali vitalitas kuno mereka dan membebaskan diri dari pemerintahan Turki. Sebuah masyarakat rahasia, termasuk al-Yaziji, dibentuk pada akhir 1870-an, menganjurkan pemberontakan melawan Ottoman, dan gerakan serupa muncul di antara tokoh-tokoh Muslim dan Kristen di Lebanon dan Damaskus. Sementara beberapa kelompok Kristen, yang mendukung kemerdekaan, mencari Lebanon yang sepenuhnya otonom, masyarakat Arab Muslim umumnya bertujuan untuk Suriah Raya yang otonom di dalam Kekaisaran Ottoman. Awal 1870-an menyaksikan pembentukan gerakan rahasia dan sirkulasi plakat di Beirut yang menyerukan perlawanan terhadap pemerintahan Ottoman. Pada tahun 1870, Francis Marrash, seorang penulis Kristen Suriah, membedakan antara gagasan tentang tanah air dan bangsa. Ketika diterapkan ke Suriah Raya, ia menyoroti bahasa, adat istiadat, kepercayaan pada kepentingan bersama, dan faktor-faktor bersama lainnya dalam mendefinisikan identitas nasional. Perbedaan ini digaungkan oleh Hasan al-Marsafi pada tahun 1881 (Suleiman, 2003).

Ketika abad ke-20 menyingsing, kelompok-kelompok Muslim Arab semakin memeluk 'pandangan diri' nasionalis Arab, meletakkan dasar bagi ideologi nasionalis Arab yang akan menjadi ciri abad berikutnya. Pada abad ke-20, nasionalisme Arab muncul sebagai gerakan politik dan budaya yang signifikan di dunia Arab, didorong oleh keinginan untuk persatuan politik Arab dan visi sekuler negara Arab bersatu. Buku Adeed Dawisha, 'Nasionalisme Arab di Abad Kedua Puluh: Dari Kemenangan ke Keputusasaan,' berpendapat bahwa gerakan ini mendapat inspirasi dari nasionalisme Romantis Jerman abad ke-19 dan menjadi terkenal setelah Perang Dunia I. Ini mencapai puncaknya pada 1950-an dan 1960-an di bawah para pemimpin seperti Gamal Abdul Nasser Mesir tetapi mengalami kemunduran parah dengan kekalahan Arab 1967 oleh Israel, akhirnya memudar pengaruhnya ketika ideologi lain, khususnya militansi Islam, diutamakan. Dawisha menekankan pentingnya membedakan antara fenomena budaya 'Arabisme' yang lebih luas dan aspirasi politik dan sekuler khusus untuk negara Arab bersatu yang menjadi ciri nasionalisme Arab. Lintasan gerakan ini, ditandai dengan periode kemenangan dan keputusasaan, berfungsi sebagai tema sentral dalam studi nasionalisme Arab di abad ke-20. Nasionalis Arab percaya pada keberadaan bangsa Arab sebagai entitas sejarah yang mendahului kebangkitan nasionalisme pada abad ke-19 dan ke-20. Sejarah, ideologi, dan gerhana gerakan ini telah dieksplorasi secara ekstensif melalui penelitian dan analisis ilmiah, memberikan wawasan tentang kompleksitas dan transformasi nasionalisme Arab selama abad ini (Dawisha, 1976).

Nasionalisme Arab, sebagai gerakan penting abad ke-20, dapat dipahami sebagai respons terhadap perambahan kolonial Barat dan sentimen anti-Ottoman yang telah meresap ke dunia Arab. Dorongan di balik nasionalisme Arab semakin didorong oleh keinginan untuk kembali ke kemurnian Islam yang dirasakan, melihatnya tidak hanya sebagai warisan budaya dan sejarah tetapi juga sebagai 'pesan abadi' dan jalan menuju keselamatan. Dalam menghadapi kolonialisme Barat, kaum nasionalis Arab mencari tanggapan Arab yang bersatu untuk menegaskan identitas mereka dan melawan dominasi eksternal. Sentimen terhadap Kekaisaran Ottoman, yang secara tradisional

dipandang sebagai penjaga Islam, muncul dari keyakinan bahwa Ottoman telah menyimpang dari esensi sejati Islam, yang menyebabkan penurunan kekuatan dan pengaruh mereka. Nasionalis Arab menganggap kebangkitan persatuan Arab dan pemulihan prinsip-prinsip Islam sebagai hal yang penting untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh imperialisme Barat (Bazzāz, 1965).

Gerakan ini, oleh karena itu, memiliki tujuan ganda: ia bertujuan untuk melawan hegemoni Barat sambil menganjurkan untuk kembali ke akar otentik Islam. Gagasan nasionalisme Arab bukan hanya strategi politik tetapi terkait dengan kebangkitan budaya dan agama yang mendalam. Nasionalis Arab memandang tujuan mereka sebagai pesan abadi dan sarana untuk mencapai keselamatan, menyajikannya sebagai kekuatan pemersatu yang dapat melampaui perpecahan buatan yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial. Ketika kaum nasionalis Arab menavigasi kompleksitas dunia modern, mereka membayangkan gerakan mereka sebagai katalisator untuk peremajaan politik dan budaya. Dalam upaya keselamatan, kebangkitan identitas Arab dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dipandang sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman bernuansa nasionalisme Arab ini sebagai respons terhadap tekanan eksternal dan kebangkitan budaya menggarisbawahi sifatnya yang beragam dan signifikansi mendalam yang dimilikinya bagi mereka yang berusaha menavigasi tantangan abad ke-20.

Munculnya nasionalisme Arab merupakan fenomena mendalam yang berakar dalam kesadaran kolektif masyarakat Arab, bertindak sebagai katalisator yang menggerakkan jiwa Arab individu dan kolektif. Menurut perspektif yang disajikan oleh Al-Bazzaz, kekuatan transformatif ini mendapatkan momentum karena menanggapi dan melawan perambahan kolonial Barat, memainkan peran penting dalam evolusi dari Dar al-Islam (Rumah Tangga Islam) ke negara-negara teritorial kontemporer. Inti dari transisi ini adalah mediasi pan-Arabisme yang berpengaruh. Al-Bazzaz mengartikulasikan pandangan bahwa nasionalisme Arab bukan hanya doktrin politik tetapi alat yang ampuh, mekanisme untuk menumbuhkan eksistensi politik yang kuat. Ini berfungsi

sebagai senjata ampuh melawan apa yang dianggap sebagai imperialisme intelektual, menegaskan agen pemikiran dan identitas Arab dalam menghadapi pengaruh eksternal. Nasionalisme Arab, dalam konteks ini, diposisikan sebagai jalan menuju keselamatan, martabat, dan keadilan, dengan tujuan menyeluruh untuk menumbuhkan semangat nasional yang dapat menavigasi tantangan dunia modern. Penegasan identitas Arab, setelah tekanan kolonial, melibatkan redefinisi batas-batas teritorial dan pergeseran ke arah konsep negara-bangsa kontemporer. Pan-Arabisme, sebagai kekuatan penuntun, memainkan peran penting dalam transformasi ini, menawarkan visi persatuan yang melampaui wilayah individu. Adopsi nasionalisme Arab dipandang sebagai respons strategis, sarana untuk melawan dominasi intelektual, dan sumber inspirasi untuk menciptakan eksistensi politik yang sehat dan bermartabat. Perspektif Al-Bazzaz mengundang pemahaman yang lebih dalam tentang nasionalisme Arab sebagai fenomena multifaset. Ini bukan hanya ideologi politik tetapi kekuatan sosial-budaya yang memanfaatkan aspirasi kolektif masyarakat Arab. Dengan membingkai nasionalisme Arab sebagai alat untuk perlawanan, perisai melawan imperialisme intelektual, dan saluran untuk mencapai keselamatan dan keadilan, Al-Bazzaz menempatkannya dalam narasi pemberdayaan dan penentuan nasib sendiri yang lebih luas dalam menghadapi tekanan eksternal.

Nasionalisme Arab, dalam konteks ini, diposisikan sebagai jalan menuju keselamatan, martabat, dan keadilan, dengan tujuan menyeluruh untuk menumbuhkan semangat nasional yang dapat menavigasi tantangan dunia modern. Penegasan identitas Arab, setelah tekanan kolonial, melibatkan redefinisi batas-batas teritorial dan pergeseran ke arah konsep negara-bangsa kontemporer. Pan-Arabisme, sebagai kekuatan penuntun, memainkan peran penting dalam transformasi ini, menawarkan visi persatuan yang melampaui wilayah individu. Adopsi nasionalisme Arab dipandang sebagai respons strategis, sarana untuk melawan dominasi intelektual, dan sumber inspirasi untuk menciptakan eksistensi politik yang sehat dan bermartabat. Perspektif Al-Bazzaz mengundang pemahaman yang lebih dalam tentang nasionalisme Arab sebagai

fenomena multifaset. Ini bukan hanya ideologi politik tetapi kekuatan sosial-budaya yang memanfaatkan aspirasi kolektif masyarakat Arab. Dengan membingkai nasionalisme Arab sebagai alat untuk perlawanan, perisai melawan imperialisme intelektual, dan saluran untuk mencapai keselamatan dan keadilan, Al-Bazzaz menemukannya dalam narasi pemberdayaan dan penentuan nasib sendiri yang lebih luas dalam menghadapi tekanan eksternal.

Gamal Abdul Nasser: Pemimpin Revolusi

Gamal Abdul Nasser, lahir pada 15 Januari 1918, dan menjabat sebagai presiden Mesir dari tahun 1956 hingga kematiannya pada tahun 1970, memegang tempat penting dalam sejarah Mesir baru-baru ini. Terkenal karena kebijakan luar negeri nasionalis Arab dan anti-kolonialnya, Nasserisme, ideologi pan-Arabis yang terinspirasi olehnya, mendapatkan popularitas luas di Dunia Arab selama tahun 1950-an dan 1960-an. Nasser dirayakan di seluruh Dunia Arab sebagai simbol martabat dan kebebasan Arab (Jacquemon, 1997). Gamal Abdul Nasser adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah politik Timur Tengah abad ke-20. Pemikirannya dibentuk oleh berbagai ideologi yang mempengaruhi kebijakan domestik dan luar negerinya, termasuk anti-imperialisme, pan-Arabisme, sosialisme Arab, dan anti-Zionisme (Marzai, 2023).

Awal terjun Gamal Abdul Nasser ke dalam politik adalah perjalanan transformatif yang dimulai pada usia muda sebelas tahun ketika ia mendaftar di sekolah menengah Ras el Tin di Alexandria. Dalam konteks dinamis lingkungan sekolahnya, kesadaran politik Nasser dipicu, menyiapkan panggung untuk komitmen seumur hidup terhadap aktivisme. Inisiasi Nasser ke ranah politik ditandai dengan peristiwa penting-partisipasinya dalam demonstrasi politik pertamanya saat masih mahasiswa. Dampaknya sangat mendalam, ketika Nasser mendapati dirinya menerima tongkat polisi, sebuah insiden yang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada identitas politiknya yang baru lahir. Sebagai bukti tekadnya yang tak tergoyahkan, tanggapan Nasser terhadap kesulitan ini bukanlah pencegahan tetapi pencelupan yang lebih dalam ke dunia

aktivisme politik. Selama tahun-tahun pembentukannya di sekolah menengah Ras el Tin, komitmen Nasser terhadap tujuan politik menjadi begitu mendalam sehingga, selama tahun terakhirnya, dedikasinya terhadap aktivisme melampaui pengejaran akademisnya. Hebatnya, ia menghabiskan hanya empat puluh lima hari secara fisik menghadiri sekolah selama periode penting ini, menggarisbawahi sejauh mana politik telah menjadi titik fokus hidupnya (Stephens, 1972).

Pada tahun 1935-1936, waktu yang sangat penting dalam karir politik awal Nasser, ia naik ke posisi ketua komite yang terdiri dari siswa sekolah menengah Kairo yang mengadvokasi reformasi politik Mesir. Peran ini menandakan kemunculan Nasser sebagai pemimpin bahkan di masa mudanya, menunjukkan kemampuannya untuk memobilisasi dan mempengaruhi rekan-rekannya dalam mengejar perubahan politik. Namun, lintasan perjalanan politik Nasser mengambil jalan memutar sementara pada Maret 1937 ketika ia diterima di Akademi Militer Mesir. Untuk sementara mengesampingkan kegiatan politiknya, Nasser mengalihkan fokusnya ke arah mengejar menjadi seorang perwira militer. Keputusan ini menyoroti sifat multifaset ambisi Nasser dan mengisyaratkan interaksi yang kompleks antara aspirasi militernya dan komitmennya yang abadi terhadap tujuan politik. Pengalaman awal Nasser, ditandai dengan aktivisme, kesulitan, dan perbedaan singkat dalam pelatihan militer, meletakkan dasar bagi perpaduan rumit karir politiknya di masa depan. Tahun-tahun formatif ini tidak hanya membentuk karakter Nasser tetapi juga memberikan gambaran sekilas tentang semangat gigih yang akan menentukan kepemimpinannya di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 1939, segera setelah lulus dan menerima komisi di ketentaraan, Gamal Abdul Nasser, bersama dengan seorang teman, mengajukan diri untuk bertugas di Sudan tepat sebelum pecahnya Perang Dunia II. Selama perang, Nasser dan Anwar Sadat, sesama teman dan sekutu politik, menjalin kontak dengan agen-agen Kekuatan Poros, terutama Italia, dan menyusun rencana kudeta bertepatan dengan serangan Italia yang diharapkan untuk mengusir pasukan Inggris keluar dari Mesir. Namun, rencana ini tidak pernah dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, Nasser mulai mengumpulkan kader perwira

militer muda yang berpikiran sama yang berbagi sentimen nasionalis Mesir yang kuat dan mendukung gagasan perubahan revolusioner. Pada akhir Perang Dunia II, Nasser, yang tidak memiliki pengalaman tempur di medan perang, kemudian akan mendapatkan pengalaman seperti itu selama perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948, terutama di Kantong Falluja dan lokasi lainnya. Setelah perang, ia mendapatkan posisi sebagai instruktur di Akademi Militer di Kairo, menyiapkan panggung untuk peran masa depannya sebagai tokoh kunci dalam lanskap politik Mesir. Selama tahun-tahun berikutnya, Nasser rajin mengorganisir sekelompok perwira yang berpikiran reformasi, secara aktif merekrut anggota baru. Setelah 1949, kolektif ini mengadopsi moniker 'Perwira Bebas' dan mengartikulasikan aspirasi yang berpusat di sekitar kebebasan dan pemulihan martabat bangsa mereka. Periode ini menandai tahap embrionik gerakan yang pada akhirnya akan mendorong Nasser dan Perwira Bebas ke garis depan politik Mesir (Nutting, 1972).

Pada tahun 1952, iklim politik yang kondusif yang dipimpin oleh ketidakpuasan yang meluas mengatur panggung untuk revolusi di Mesir. Memanfaatkan lingkungan ini, Gamal Abdul Nasser dan Free Officers mengatur kudeta pada 23 Juli 1952. Kudeta berlangsung dengan Free Officer merebut kendali atas lembaga-lembaga utama pemerintah, stasiun radio, kantor polisi, dan markas tentara di Kairo. Jenderal Muhammad Naguib, seorang tokoh yang dihormati dari Perang Arab-Israel 1948, diangkat sebagai presiden segera setelah kudeta. Sebuah langkah strategis dibuat oleh pemerintah baru untuk meyakinkan Inggris, memastikan rasa hormat warga negara Inggris dan properti di Mesir, sehingga mengurangi kemungkinan intervensi asing terhadap kudeta. Selain itu, di bawah tekanan Amerika, Raja Farouk yang digulingkan dan keluarganya diizinkan meninggalkan Mesir tanpa cedera dan dengan hormat. Setelah mengambil alih kekuasaan, Nasser dan Perwira Bebas memilih untuk tidak terlibat dalam administrasi sehari-hari pemerintah Mesir. Sebaliknya, mereka menunjuk Ali Maher, orang dalam politik berpengalaman, sebagai perdana menteri. Lokus kekuasaan yang sebenarnya bergeser ke Dewan Komando Revolusi Mesir, dengan

Naguib sebagai ketua dan Nasser sebagai wakil ketua. Meskipun awalnya tampaknya berfokus pada pemerintahan praktis, Dewan Revolusi menunjukkan kecenderungan ideologis yang kuat. Ini menjadi jelas ketika Ali Maher mengundurkan diri pada 7 September 1952, karena menolak untuk mendukung undang-undang reforma agraria yang diusulkan oleh dewan. Selanjutnya, Naguib mengambil alih kepemimpinan penuh sebagai perdana menteri baru, menandai momen penting dalam lanskap politik pasca-kudeta (Haykal & Heikal, 1973). Berikut tabel yang dapat memperlihatkan gebrakan revolusi dan reformasi signifikan yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser di Mesir (Beinin, 2021):

Tabel 1.1 Revolusi dan Reformasi Gamal Abdul Nasser

No.	Tahun	Peristiwa	Deskripsi
1	1952	Revolusi Mesir 1952	Nasser merupakan tokoh kunci dalam Gerakan Perwira Bebas yang menggulingkan Raja Farouk dan mendirikan republik di Mesir. Revolusi ini menandai awal era baru dalam politik Mesir dan menjadi preseden untuk kudeta militer di Dunia Arab.
2	1952	Reformasi Agraria	Setelah revolusi, Nasser memperkenalkan reformasi agraria yang signifikan, yang bertujuan untuk mendistribusikan ulang tanah dari elit kaya kepada mayoritas petani. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mayoritas rakyat Mesir.
3	1952	Pembentukan Dewan Komando Revolusioner	Nasser dan Perwira Bebas lainnya membentuk Dewan Komando Revolusioner (RCC), yang menjadi pemerintahan de facto Mesir. RCC bertujuan untuk menghapus monarki dan aristokrasi, mengakhiri pendudukan Inggris, dan memastikan kemerdekaan Sudan.
4	1956	Nasionalisasi Terusan Suez	Nasser menasionalisasi Terusan Suez, yang merupakan langkah ekonomi dan politik yang signifikan. Tindakan ini memicu Krisis Suez, di mana Mesir diserang oleh Inggris, Prancis, dan Israel, tetapi akhirnya Mesir berhasil menguasai terusan tersebut.
5	1958	Kesatuan Arab dan Republik Arab Bersatu	Nasser menyatukan Mesir dan Suriah di bawah Republik Arab Bersatu (UAR), yang bertujuan untuk mempromosikan persatuan dan solidaritas Arab. Langkah ini dipandang sebagai langkah besar menuju pan-Arabisme dan memiliki implikasi signifikan bagi kawasan tersebut.
6	1950-an - 1960-an	Reformasi Sosial dan Ekonomi	Nasser melaksanakan berbagai reformasi sosial dan ekonomi, termasuk program pendidikan dan kesehatan gratis, pengembangan pertanian, dan industrialisasi. Reformasi ini bertujuan untuk memodernisasi Mesir dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Implementasi Kebijakan Nasser dan Dampaknya

Gamal Abdul Nasser, Presiden kedua Mesir, memegang pengaruh signifikan selama masa jabatannya dari tahun 1952 hingga 1970, menerapkan berbagai kebijakan yang meninggalkan dampak abadi pada negara tersebut. Kepemimpinan Nasser ditandai dengan visi ambisius untuk kemajuan Mesir, dengan fokus pada pembangunan politik, kerja sama fiskal, dan industrialisasi untuk mengangkat bangsa (Jeforte, 2022). Salah satu inisiatif utama Nasser adalah penerapan sistem komprehensif yang bertujuan mendukung pembangunan politik. Nasser berusaha memodernisasi lanskap politik Mesir, memperkenalkan reformasi untuk membangun struktur pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Ini termasuk upaya untuk memperkuat institusi politik, memperluas perwakilan politik, dan melibatkan warga negara dalam proses demokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem politik yang lebih kuat dan responsif yang dapat secara efektif memenuhi kebutuhan rakyat Mesir. Selain pembangunan politik, Nasser menempatkan penekanan kuat pada kerja sama fiskal sebagai sarana untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Mesir. Dia menerapkan kebijakan untuk meningkatkan manajemen fiskal, mempromosikan kerja sama keuangan, dan mengatasi tantangan ekonomi. Pemerintahan Nasser bekerja untuk mencapai kerangka ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan yang dapat mendukung tujuan pembangunan negara. Industrialisasi adalah landasan lain dari agenda Nasser. Menyadari pentingnya swasembada ekonomi, Nasser memulai proyek-proyek industri ambisius untuk mendiversifikasi ekonomi Mesir dan mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber eksternal. Visinya termasuk pembentukan industri utama, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan teknologi untuk mendorong Mesir ke posisi yang lebih maju dan kompetitif di panggung global. Upaya industrialisasi Nasser sering ditandai dengan nasionalisasi sektor-sektor utama, seperti Terusan Suez pada tahun 1956, yang memiliki dampak mendalam pada lanskap ekonomi Mesir. Dengan memprioritaskan pembangunan industri, Nasser bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan posisi Mesir di antara

bangsa-bangsa (Crowcroft, 2016). Sementara kebijakan Nasser ditujukan untuk mendorong pembangunan nasional, mereka bukannya tanpa kontroversi. Pendekatannya terhadap pemerintahan dan perencanaan ekonomi menghadapi kritik, dan hasil dari beberapa kebijakan beragam. Namun demikian, warisan Nasser sebagai pemimpin transformatif yang berusaha memodernisasi Mesir dan menegaskan kemerdekaannya di panggung internasional tetap menjadi bab penting dalam sejarah negara itu (Ali, 2022).

Dalam tulisannya sendiri Nasser mengakui bahwa satu-satunya jalan adalah Revolusi untuk Mesir yang lebih baik. Rezim baru di Mesir, di bawah kepemimpinan Gamal Abdul Nasser, telah melakukan rencana pembangunan tiga cabang yang luas dan terintegrasi untuk negara itu. Salah satu proyek utama adalah pembangunan Sadd el 'Ali (Bendungan Tinggi), terutama ditujukan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mereklamasi tambahan 2 juta hektar tanah. Mega-bendungan ini, yang terletak di selatan Bendungan Aswan, dirancang sebagai lapangan batu granit piramidal dan akan menjadi bendungan tertinggi di dunia, dengan reservoir seluas 3.000 kilometer persegi. Konstruksi akan dimulai pada tahun 1955, dengan penyelesaian diharapkan dalam sepuluh tahun, menelan biaya \$ 516 juta. Bendungan Tinggi diproyeksikan akan berkontribusi signifikan terhadap produksi nasional dan pendapatan pemerintah. Sementara itu, rencana jangka pendek mencakup perluasan lahan pertanian, dengan fokus pada reklamasi 311.680 hektar di Mesir Atas dan Bawah, termasuk pembentukan Provinsi Tahrir (Pembebasan). Selain itu, ada rencana untuk mereklamasi 50.000 hektar di Semenanjung Sinai untuk pengungsi Palestina dan menjajaki kemungkinan reklamasi 100.000 hektar menggunakan sumur artesis bekerja sama dengan program Point Four Amerika Serikat. Pemerintah juga mengintensifkan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian per hektar.

Program Reforma Agraria telah meningkatkan hasil panen di daerah yang terkena dampak, dan masyarakat koperasi pedesaan telah dibentuk untuk mendukung pemilik tanah kecil baru dengan sumber daya dan saran teknis. Kementerian Pertanian secara

aktif terlibat dalam memerangi hama, meningkatkan ternak, dan mempromosikan berbagai industri pertanian. Kebijakan reformasi terpadu meluas ke pengembangan industri, dengan proyek-proyek seperti skema Sadd el 'Ali menyediakan pembangkit listrik tenaga air dan pabrik pupuk berkontribusi terhadap perbaikan tanah. Pemerintah juga fokus memaksimalkan sumber daya minyak melalui revisi kebijakan dan pemberian konsesi kepada perusahaan asing. Proyek-proyek industri besar yang diuraikan dalam rencana tersebut termasuk pabrik pupuk, pekerjaan besi dan baja, pabrik kertas, dan pabrik goni. Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pergeseran modal dari pertanian ke industri. Pemerintah menerapkan langkah-langkah untuk mendukung industri swasta, termasuk peningkatan komunikasi internal, tarif protektif, dan dorongan modal asing. Untuk mengatasi defisit perdagangan luar negeri, pemerintah melakukan diversifikasi ekspor dan memotong impor yang tidak penting. Upaya untuk memulihkan kepercayaan dalam perdagangan kapas Mesir, menghilangkan praktik korupsi, dan mengadopsi kebijakan perdagangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi telah berkontribusi pada neraca perdagangan yang positif, menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi negara (Nasser, 1955).

Gamal Abdul Nasser, selama masa kepresidenannya dari tahun 1952 hingga 1970, menerapkan serangkaian kebijakan komprehensif yang bertujuan tidak hanya mengembangkan ekonomi Mesir tetapi juga mengubah kedudukan politik dan internasionalnya. Masa jabatannya menandai era modernisasi yang signifikan, reformasi sosialis, dan komitmen teguh terhadap nasionalisme pan-Arab, yang diperluas untuk mendorong solidaritas dunia. Salah satu proyek landasan di bawah kepemimpinan Nasser adalah skema Sadd el 'Ali (Bendungan Tinggi), sebuah upaya monumental untuk merebut kembali 2 juta hektar tanah, meningkatkan hasil pertanian, dan menyediakan pembangkit listrik tenaga air untuk pengembangan industri. Inisiatif ini, di samping rencana jangka pendek untuk reklamasi lahan dan ekspansi pertanian, memamerkan dedikasi Nasser untuk memperkuat fondasi ekonomi Mesir. Integrasi pertanian dan

industri dalam kebijakan reformasi Nasser terbukti dalam berbagai proyek, seperti pembangunan pabrik pupuk dan pekerjaan besi dan baja.

Upaya industri ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengalihkan modal dari pertanian ke industri, dengan kompensasi bagi pemilik tanah besar dalam bentuk obligasi yang dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek ini. Keputusan kebijakan luar negeri Nasser memainkan peran penting dalam membentuk politik dunia, khususnya di dunia Arab. Pembelaannya untuk nasionalisme pan-Arab dan sikap tegas melawan imperialisme Barat bergema dengan banyak orang di seluruh wilayah. Pembangunan Bendungan Sadd el 'Ali dan perluasan eksploitasi sumber daya minyak mencerminkan upaya untuk menegaskan kemandirian ekonomi Mesir dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing. Selain itu, kebijakan Nasser membawa manfaat ekonomi yang nyata bagi berbagai segmen masyarakat Mesir, terutama tenaga kerja di lingkungan perkotaan dan pertanian. Program Pembaruan Agraria, misalnya, memberdayakan petani dengan menjadikan mereka pemilik tanah, yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian. Di panggung internasional, pengaruh Nasser terasa di luar perbatasan Mesir. Perannya dalam memperjuangkan tujuan Arab dan menantang dominasi Barat berkontribusi pada dampak mendalam dan abadi pada lanskap politik, ekonomi, dan internasional Mesir. Secara keseluruhan, kebijakan Nasser meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada lintasan perkembangan Mesir, membentuk identitas dan peran bangsa di arena global (James, 2005).

Pada Februari 1968, Mesir mengalami protes signifikan terhadap rezim Nasser, menandai demonstrasi besar pertama sejak 1954. Katalis untuk protes ini adalah keringanan hukuman yang dirasakan dalam menghukum komandan angkatan udara yang bertanggung jawab atas ketidakmampuan selama perang 1967. Sementara keluhan awal berfokus pada isu-isu militer, demonstrasi berkembang untuk mengartikulasikan tuntutan yang lebih luas untuk kebebasan berekspresi, demokrasi, dan pembatasan kekuatan pasukan keamanan internal. Protes berlangsung selama hampir seminggu,

mengakibatkan bentrokan dengan polisi yang menyebabkan korban, termasuk dua pekerja tewas dan enam puluh tujuh warga sipil terluka. Penggunaan kekuatan, seperti tembakan yang ditembakkan ke mahasiswa di Alexandria, menggarisbawahi kekurangan proyek Sosialis Arab Nasser. Meskipun demikian, prestise pribadi Nasser tetap cukup kuat baginya untuk menengahi Perjanjian Kairo November 1969, yang mempercayakan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dengan tanggung jawab terkait dengan pengungsi Palestina di Lebanon. Melanjutkan upaya diplomatiknya, Nasser memainkan peran kunci dalam KTT Liga Arab September 1970, di mana ia bekerja tanpa lelah untuk menengahi gencatan senjata yang mengakhiri perang saudara Palestina-Yordania. Dia juga memfasilitasi evakuasi kelompok-kelompok bersenjata Palestina dari Yordania ke Lebanon. Namun, upaya diplomatik yang intens berdampak buruk pada kesehatan Nasser, yang telah diungkapkan kepada publik selama bertahun-tahun. Ketegangan fisiknya memuncak dalam serangan jantung fatal pada 28 September 1970. Gamal Abdul Nasser melambangkan aspirasi negara-negara pasca-kolonial di Global South untuk menegaskan kepentingan berdaulat di dunia non-bipolar. Sementara mencapai pengakuan internasional selama era dekolonisasi, kepemimpinan Nasser mengungkapkan keterbatasan, terutama dalam kurangnya kepercayaan pada rakyat Mesir. Meskipun memperbaiki banyak kehidupan dan membangun hubungan emosional dengan rakyat, kegagalan utamanya sebagai pemimpin berakar pada keraguan ini (Beinin, 2021).

Warisan Gamal Adul Nasser yang Berdampak untuk Mesir hingga saat ini

Warisan Gamal Abdul Nasser ditandai oleh era transformatif dalam sejarah Mesir, dengan pencapaian signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Revolusi 23 Juli 1952, yang dipimpin oleh Nasser, bertujuan untuk membebaskan Mesir dari hubungan semi-feodal, pendudukan Inggris, dan monarki yang korup. Visi Nasser mencakup reformasi ekonomi, keadilan sosial, dan kebijakan nasionalis. Secara ekonomi, Nasser menerapkan reformasi tanah, menasionalisasi industri-industri utama, dan berfokus pada

swasembada. Pembangunan Bendungan Tinggi, sebuah proyek monumental, memperluas lahan pertanian dan memastikan kemandirian energi. Meskipun mengalami kemunduran dalam perang 1967, ekonomi Mesir mempertahankan pertumbuhan, mencapai peningkatan tahunan 8% yang luar biasa pada tahun 1969 dan 1970. Sektor publik, diperkirakan mencapai 1.400 miliar dolar, menjadi tulang punggung kekuatan industri Mesir. Reformasi sosial Nasser memprioritaskan pendidikan, mengurangi buta huruf dari 80% menjadi 50% pada tahun 1970. Pendidikan gratis di semua tingkatan menghasilkan cendekiawan seperti Ahmed Zewail dan Mustafa El Sayed. Pembangunan infrastruktur mencapai desa-desa, menyediakan listrik, air bersih, dan perawatan kesehatan. Asuransi sosial dan pensiun diperkenalkan, menguntungkan orang Mesir bebas utang. Secara politis, rezim Nasser menghadapi tantangan, termasuk protes pada tahun 1968, tetapi upaya mediasinya di dunia Arab dan penerimaan Rogers Initiative memamerkan keterampilan diplomatiknya.

Nasionalisasi Terusan Suez pada tahun 1956 dan pemulangan dana setelah agresi tripartit menunjukkan komitmen Nasser terhadap kedaulatan Mesir. Namun, kematian Nasser menandai titik balik. Para pemimpin berikutnya bergeser dari kebijakan Nasser. Proyek-proyek ekonomi dihentikan, dan sektor publik menghadapi pembongkaran. Militer, yang dibangun di bawah Nasser, memainkan peran penting dalam Perang Oktober, tetapi keputusan selanjutnya berdampak pada kemampuan pertahanan jangka panjang negara itu. Proyek-proyek di bidang kedirgantaraan, pengembangan nuklir, dan pertahanan ditinggalkan. Penghancuran warisan Nasser dimulai, dengan perubahan dalam politik dan kebijakan. Sektor publik yang dulu kuat menghadapi tantangan, dan arah ekonomi bergeser. Mesir, yang telah mencapai kemajuan luar biasa dalam waktu singkat, menghadapi lintasan yang berbeda setelah kematian Nasser. Warisan kompleks Gamal Abdul Nasser terus membentuk perdebatan dan diskusi tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan Mesir (Nasser Youth Movement, 2022).

Lebih dari 50 tahun setelah kematiannya, Nasser masih hadir dalam imaji Mesir. Karakternya sering diingatkan, warisan kontroversialnya diperdebatkan, potretnya

diangkat, dan pidatonya beredar. Dibandingkan dengan pemimpin Arab lainnya pada abad terakhir, sedikit yang memiliki dampak berkelanjutan yang meluas ke negara-negara Arab lain seperti Nasser. Posisinya yang tak tertandingi, yang masih terasa hingga hari ini, mengubahnya dari sejarah menjadi kenangan, dari domain ilmuwan politik menjadi karya penulis dan seniman - singkatnya, dari sosok nyata menjadi metafora. Apakah dipuja atau dihujat, diangkat atau dihinakan, dielu-elukan sebagai simbol kebebasan, anti-kolonialisme, dan keadilan sosial, atau dicemarkan sebagai diktator kejam yang membentuk kultus kepribadian dan mempopulerkan model otoriter di antara bangsa Arab, Nasser adalah subjek emosional dan kontroversial, merupakan aglomerasi makna yang melampaui hasil langsung pemerintahannya untuk meresap dalam psikologi generasi Mesir dan Arab. Ia menjadi tempat di mana mereka memproyeksikan impian dan aspirasi, kekalahan dan kekecewaan. Mereka yang tidak lagi percaya pada 'pahlawan individu' dibebaskan dari ilusi besar, tetapi mereka masih belum dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Nasser. Dalam upayanya menganalisis ideologi Nasser, sejarawan Mesir Sherif Younis menyimpulkan bahwa pengkritik dan pengagung Nasser bersaksi tentang keberadaan abadi presiden ini dalam kehidupan Mesir. Bagi Younis, Nasser adalah perwujudan tertinggi dari gagasan "penyelamat", impian yang begitu tertanam dalam imajinasi Mesir. Mengapa bahkan mereka yang menyadari ketidakbenaran konsep ini "tidak bisa meninggalkan Nasser di makamnya dan melampaui dia?" tanya Younis.

Warisan Nasser juga berdampak pada pemikiran politik kontemporer di Mesir, membentuk dinamika politik antara dua figur utama: Hamdeen Sabahi dan Abdul Fattah el-Sisi. Sabahi, seorang Nasseris sejati, berusaha merepresentasikan prinsip-prinsip Nasser sambil mendorong sistem demokratis yang jelas mendefinisikan dan membatasi peran presiden, suatu hal yang dianggapnya sebagai kelemahan dalam pemerintahan Nasser. Sebaliknya, kenaikan el-Sisi, terutama setelah penggulingan Mohamed Morsi pada tahun 2013, memunculkan perbandingan dengan Nasser, dengan gambar keduanya seringkali ditampilkan bersama. Fenomena "Sisi-Nasser" ini mencerminkan kerinduan

masyarakat akan seorang pemimpin yang kuat, sambil merenungkan kembali era Nasser. Artikel ini mendiskusikan pemaknaan citra Nasser yang beragam oleh segmen berbeda dalam masyarakat Mesir, menekankan interpretasi yang selektif terhadap warisan pemimpin tersebut. Pemilihan presiden tahun 2014, dengan melibatkan Sabahi dan el-Sisi, menyoroiti keberlanjutan warisan Nasser yang kontroversial. Meskipun Ikhwanul Muslimin mengutuk Sisi dengan mengaitkannya dengan Nasser, beberapa anggota dalam organisasi tersebut menolak perbandingan tersebut. Citra abadi Nasser, yang diwariskan melalui dinamika politik saat ini, menunjukkan bahwa, meskipun kegagalan Sisi, Nasser tetap menjadi simbol keadilan sosial, martabat, dan kesetaraan dalam imajinasi masyarakat Mesir. Seiring waktu, warisan Nasser tetap menjadi tema sentral dalam diskusi mengenai masa depan politik Mesir, menantang pandangan tentang kepemimpinan dan arah yang diinginkan oleh masyarakatnya (Middle East Eye, 2022).

Pembahasan

Pemikiran politik dan praktik politik oleh Gamal Abdul Nasser membentuk fondasi yang kuat bagi peran militer dalam politik dan ekonomi Mesir pada masanya. Adapun beberapa poin penting yang menjadi warisan untuk Mesir diantaranya adalah pengaruhnya terhadap militer dan juga ekonomi. Pertama, warisan akan keberlanjutan militer. Pemikiran politik Abdul Nasser meninggalkan warisan penting dalam konteks perubahan peran militer dalam politik dan ekonomi Mesir. Di bawah kepemimpinannya, militer tidak hanya menjadi kekuatan pertahanan tetapi juga pemain utama dalam ekonomi nasional, mengarahkan investasi dalam industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan infitah (pembukaan ekonomi) oleh Sadat mengurangi kontrol militer atas ekonomi, menggantikan mereka dengan ekonom dan sipil. Meskipun kehilangan kendali penuh, militer tetap terlibat dalam investasi ekonomi, terutama melalui organisasi seperti National Service Projects Organisation dan Arab Industrial Organisation (Salem, 2020). Peralihan ke neoliberalisme dimulai dengan kebijakan infitah yang mengarahkan militer ke investasi ekonomi, khususnya proyek pembangunan

nasional. Militer memanfaatkan keuntungan seperti akses ke tenaga kerja murah melalui wajib militer, anggaran tersembunyi dari audit resmi, dan kepemilikan tanah publik untuk memperluas pengaruh ekonomi mereka. Meskipun tidak memegang kendali langsung atas prioritas dan skala investasi, militer tetap memiliki kekuatan signifikan di bawah Sadat dan Mubarak. Investasi besar mereka di pasar domestik, mulai dari produksi makanan hingga pembangunan mal dan rumah sakit mewah, menunjukkan adaptabilitas mereka dalam mempertahankan kekuatan dan pengaruh.

Hubungan antara militer dan kelas penguasa finansial tetap rapuh, terutama mengingat privatisasi sektor publik yang bersejarah nya bagian dari investasi militer. Transformasi dalam strategi akumulasi kekayaan terlihat jelas dengan pergeseran dari fokus pada modal produktif dan nasional di bawah Nasser ke modal finansial pada 1990-an dan 2000-an. Pergeseran ini mengurangi hegemoni kelas sosial finansial dan mengubah dinamika politik dan ekonomi di Mesir. Warisan penting Nasser terletak pada bagaimana militer tetap menjadi kekuatan dominan dalam ekonomi bahkan setelah kehilangan kontrol langsung atas posisi produksi. Ini menunjukkan adaptabilitas militer dalam mempertahankan kekuatan dan pengaruh mereka melalui transformasi ekonomi, meskipun dalam konteks yang berbeda. Peralihan dari fokus pada modal produktif dan nasional ke modal finansial menunjukkan dampak jangka panjang dari kebijakan Nasser dalam menciptakan dasar ekonomi yang kuat namun rentan terhadap perubahan kebijakan neoliberal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, Mesir secara historis memiliki tradisi kuat di mana para pemimpin militer memegang jabatan presiden. Sejak revolusi tahun 1952, setiap presiden non-interim Mesir, kecuali Mohamed Morsi, memiliki latar belakang militer. Tren ini terus berlanjut, dengan contoh-contoh penting termasuk Gamal Abdul Nasser dan Abdul Fattah el-Sisi. Nasser yang memiliki banyak pengaruh dalam sejarah nasionalisme Arab di Mesir. Gamal Abdul Nasser memainkan peran krusial dalam menentukan peran militer dalam politik Mesir pasca-1952. Setelah Revolusi 1952 yang dipimpin oleh perwira militer termasuk Nasser, militer Mesir tidak hanya menjadi penjaga keamanan tetapi juga pilar utama dalam pembangunan nasional (Istituto per gli

Studi di *Politica Internazionale*, 2021). Nasser membangun legitimasi kekuasaannya dengan menggabungkan ideologi nasionalis Arab dan sosialisme, mengukuhkan posisi militer sebagai penjaga stabilitas politik. Pada masa Nasser, militer diperluas perannya tidak hanya dalam aspek keamanan tetapi juga menguasai sektor ekonomi dan media. Hal ini mencerminkan kekuatan institusional yang luas, menciptakan fondasi untuk campur tangan militer yang kuat dalam politik domestik Mesir. Meskipun Nasser wafat pada 1970, warisan politiknya terus mempengaruhi Mesir. Pengaruh ini dapat dilihat dalam penguatan peran militer di bawah kepemimpinan Abdul Fattah al-Sisi sejak 2013, yang menunjukkan kontinuitas dalam penggunaan militer sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas dan otoritas rezim.

Selain Politik dan militer pengaruh Nasser juga secara signifikan berpengaruh terhadap perekonomian Mesir. Warisan ekonomi Gamal Abdul Nasser dipandang oleh pemerintah Mesir saat ini di bawah Presiden Abdul Fattah el-Sisi dengan campuran nostalgia dan kritik. Mereka mengakui pencapaian signifikan di bawah pemerintahan Nasser namun juga mengkritik kebijakannya karena sifatnya yang statis dan otoriter (M. Smith, 2024). Pemerintahan Nasser melaksanakan beberapa proyek ekonomi yang meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian Mesir. Inisiatif utamanya mencakup pembangunan Bendungan Tinggi Aswan, perluasan Terusan Suez, dan pembentukan sektor publik yang substansial. Upaya-upaya ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Mesir pada tahun 1950an dan 1960an. Namun, pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden el-Sisi mengkritik kebijakan ekonomi Nasser karena penekanannya pada pembangunan yang dipimpin negara dan nasionalisasi industri (Sayigh, 2019). Mereka berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ini menyebabkan inefisiensi dan menghambat partisipasi sektor swasta. Berbeda dengan pendekatan Nasser, pemerintah saat ini menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk memprivatisasi perusahaan milik negara dan mendorong liberalisasi ekonomi. Pergeseran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi asing, yang mencerminkan penyimpangan dari strategi ekonomi

Nasser yang lebih terpusat. Militer Mesir memainkan peran penting dalam perekonomian saat ini, namun pengaruh dan aktivitasnya telah berkembang sejak masa Nasser (Dunne, 2023). Saat ini, militer menguasai berbagai sektor, termasuk konstruksi, semen, transportasi, kesehatan, komunikasi, media, teknik, farmasi, pupuk, pariwisata, dan metalurgi. Cakupan yang diperluas ini berbeda dengan era Nasser, di mana keterlibatan militer dalam bidang ekonomi kurang luas. Berbeda dengan kebijakan Nasser, yang menekankan pembangunan dan nasionalisasi yang dipimpin oleh negara, pemerintah saat ini telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk memprivatisasi perusahaan milik negara dan mendorong liberalisasi ekonomi. Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi asing, berbeda dengan strategi ekonomi Nasser yang lebih terpusat. Namun, kegiatan ekonomi militer saat ini sering dikritik karena kurangnya transparansi dan potensi korupsi. Ketidakjelasan ini telah menimbulkan kekhawatiran mengenai persaingan tidak sehat dan ketegangan sosial, isu-isu yang kurang umum terjadi pada masa jabatan Nasser. Meskipun terdapat kritik-kritik ini, peran ekonomi militer tetap signifikan, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur besar dan sektor-sektor yang penting bagi pembangunan nasional. Pengaruh yang meluas ini menyebabkan militer menjadi pemain utama di sektor swasta Mesir, dengan pensiunan perwira senior yang memegang posisi penting baik di aparat sipil maupun perusahaan sektor publik, sebuah tren yang tidak terlalu terlihat pada masa pemerintahan Nasser.

Pengaruh Gamal Abdul Nasser terhadap politik Mesir dan peran militer dalam pemerintahan serta ekonomi negara ini memiliki dampak yang mendalam dan berkelanjutan, membentuk lintasan sejarah modern Mesir. Nasser, dengan gaya kepemimpinan karismatik dan kebijakan nasionalis serta sosialisnya, tidak hanya mengubah lanskap politik domestik Mesir tetapi juga memperkuat peran sentral militer dalam politik, yang tetap kuat hingga saat ini. Naiknya Nasser ke tampuk kekuasaan pada tahun 1950-an menandai perubahan radikal dari tatanan politik Mesir sebelumnya. Visi nasionalisme dan sosialisme Arabnya memperoleh dukungan luas dari masyarakat Mesir

yang haus akan perubahan dan bangkitan nasional setelah masa kolonial dan monarki. Nasser memanfaatkan militer, di mana ia memiliki latar belakang sebagai perwira, sebagai sekutu utama dalam memperkuat kekuasaannya. Ini tidak hanya meningkatkan status militer tetapi juga mengintegrasikannya dalam struktur negara dengan erat, memungkinkan militer tidak hanya sebagai penjaga rezim tetapi juga sebagai pemain kunci dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Kebijakan Nasser untuk memodernisasi ekonomi dan masyarakat Mesir sangat terkait dengan perluasan peran militer. Proyek-proyek ekonomi besar seperti Bendungan Tinggi Aswan dan nasionalisasi industri strategis menjadi pilar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya industri Mesir. Meskipun mencapai kesuksesan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, inisiatif ini juga menanamkan pengaruh militer dalam sektor ekonomi yang strategis, membentuk pola pengaruh yang berkelanjutan. Di bidang kebijakan luar negeri, Nasser memainkan peran penting dalam meningkatkan profil internasional Mesir melalui langkah-langkah seperti nasionalisasi Terusan Suez dan kepemimpinannya dalam Gerakan Non-Blok. Militer terlibat aktif dalam menjaga integritas wilayah Mesir dan berperan krusial dalam konflik regional, menggarisbawahi perannya sebagai pembela nasional dan pengambil keputusan dalam diplomasi luar negeri.

Di luar kebijakan langsungnya, warisan Nasser mengubah kerangka kelembagaan pemerintahan Mesir dengan memusatkan kekuasaan dalam kepresidenan dan memperluas peran militer dalam administrasi sipil. Pensentuhan pensiunan perwira dalam posisi penting di berbagai sektor pemerintahan dan badan usaha milik negara mengukuhkan pengaruh militer dalam struktur birokrasi dan ekonomi Mesir. Meskipun kebijakan Nasser telah berkembang seiring berjalannya waktu, pengaruh militer yang kuat tetap terasa dalam politik dan ekonomi Mesir kontemporer. Hal ini mencerminkan tantangan berkelanjutan bagi rezim-rezim pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kontrol militer yang terakar dan tuntutan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan reformasi politik. Nasser membangun identitas nasional Mesir di

bawah bendera nasionalisme Arab yang menekankan persatuan dan kebangkitan dari masa kolonialisme. Namun, sementara nasionalisme ini memobilisasi masyarakat, hal ini juga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan meningkatkan kompleksitas geopolitik regional. Dalam era globalisasi saat ini, nasionalisme tetap relevan tetapi menghadapi tantangan baru dengan identitas global yang semakin terkoneksi dan dinamika politik yang kompleks di tingkat internasional.

Kesimpulan

Mengenai nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser dan dampaknya pada Mesir era modern menggambarkan sebuah perjalanan sejarah yang kompleks dan penuh dinamika. Secara keseluruhan, Nasser berhasil membentuk dan menggalang semangat nasionalisme Arab dengan keberhasilannya dalam menggulingkan rezim monarki di Mesir dan perannya dalam menghadapi kolonialisme serta imperialisme. Penting untuk dicatat bahwa popularitas Nasser tidak hanya didasarkan pada retorika nasionalistiknya, tetapi juga pada keberhasilannya menggambarkan Mesir sebagai pemimpin dunia Arab yang mampu melawan pengaruh Barat dan Zionisme. Revolusi yang dipimpin oleh Nasser menciptakan identitas nasional yang kuat dan membangun fondasi bagi modernisasi Mesir. Dampaknya terhadap Mesir era modern sangat signifikan. Meskipun terdapat keberhasilan dalam membangun infrastruktur dan modernisasi ekonomi, terdapat juga kritik terhadap pendekatan otoriter Nasser dalam memerintah. Gamal Abdul Nasser, membawa perubahan radikal dengan mengangkat dirinya menjadi presiden dan memperkuat peran militer dalam pemerintahan. Salah satu warisannya yang paling menonjol adalah transformasi militer Mesir dari sekadar sebuah institusi pertahanan menjadi kekuatan politik yang dominan di negara ini. Nasser tidak hanya menggunakan kekuatan militer untuk mengonsolidasi kekuasaannya, tetapi juga mengubah politik luar negeri Mesir dengan aktif berpartisipasi dalam gerakan pan-Arabisme dan menentang imperialisme Barat, seperti yang terlihat dalam krisis Suez tahun 1956. Langkah terkenalnya adalah nasionalisasi Terusan Suez,

yang menegaskan kedaulatan Mesir atas sumber daya strategis dan menunjukkan bahwa militer dapat menjadi instrumen kuat dalam mencapai tujuan politik nasional. Selain itu, Nasser memperkenalkan konsep Arab Socialism, menggabungkan ideologi dengan kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan dengan bantuan militer, menambah dimensi ideologis pada kekuatan militer dalam politik Mesir. Namun, warisan Nasser ini juga menimbulkan kontroversi dan meninggalkan dampak jangka panjang yang kompleks, menguatkan posisi militer secara politis namun juga menghadirkan tantangan terhadap stabilitas politik internal negara.

Referensi

- Abdurrahman, D., Sodikin, A., Muhsin, I., Herawati, Firdaus, I., & Khuluq, L. (2002). *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta.
- Ali, M. N. (2022). The Arab Republic of Egypt Government's Policy during Gamal Abdul Naseer Reign (1952-1962). *Journal of Islamic History and Manuscript*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/jihm.v1i1.5981>
- Altun, T. (2022). *Charismatic Leadership in Egypt: Gamal Abdul Nasser* [Master Thesis, Middle East Technical University]. <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/101234>
- Antonius, G. (1961). *The Arab Awakening; the Story of the Arab National Movement*. London, H. Hamilton.
- Aziz, M. A. (2009). The Origins of Arab Nationalism. *Pakistan Horizon*, 62(1), 59–66.
- Bazzāz, 'Abd al-Rahmān. (1965). *On Arab Nationalism*. S. Austin.
- Beinin, J. (2021). *How Egypt's Gamal Abdul Nasser Changed World Politics*. <https://jacobin.com/2021/11/egypt-gamal-abdul-nasser-world-politics-arab-socialism-anti-imperialism-history>
- Crowcroft, B. (2016). EGYPT'S OTHER NATIONALISTS AND THE SUEZ CRISIS OF 1956. *The Historical Journal*, 59(1), 253–285. <https://doi.org/10.1017/S0018246X15000060>
- Dawisha, A. I. (1976). *Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy*. Wiley.
- Dugis, V. (1999). Defining Nationalism in the Era of Globalization. *Masyarakat, Kebudayaan, Politik*, 12, 51–57.
- Dunne, C. W. (2023, October 4). *Egypt's Role in Arab Politics: Punching Below its Weight*. Arab Center Washington DC. <https://arabcenterdc.org/resource/egypts-role-in-arab-politics-punching-below-its-weight/>
- Gellner, E. (1981). Nationalism. *Theory and Society*, 10(6), 753–776.
- Haykal, M. ḥasanayn, & Heikal, M. H. (1973). *The Cairo documents: The Inside Story of Nasser and His Relationship with World Leaders, Rebels, and Statesmen* (First U.S. edition). Doubleday.
- Holzer, J., June 29, M. I., & 2023. (2023, June 29). What is the difference between

- nationalism and patriotism? • Missouri Independent. *Missouri Independent*.
<http://missouriindependent.com/2023/06/29/what-is-the-difference-between-nationalism-and-patriotism/>
- Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. (2021). The Role of Egypt's Armed Forces: A Military Empire. ISPI. <https://www.ispionline.it/en/publication/role-egypts-armed-forces-military-empire-27403>
- Jacquemond, R. (1997, July 1). *Egypt's intellectuals rediscover Nasser*. *Le Monde Diplomatique*. <https://mondediplo.com/1997/07/egypt>
- James, L. (2005). Nasser and His Enemies: Foreign Policy Decision Making in Egypt on the Eve of the Six Day War. *Middle East Review of International Affairs*, Volume 9, Number 2, June 2005.
https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/meria/meria_jun05/meria05_jal01.html
- jeforte. (2022). *Gamal Abdul Nasser – Global Political Theory*.
<https://globalpoliticaltheoryproject.pages.wm.edu/2022/04/01/nasser/>
- Kamenka, E. E. (1976). *Nationalism: The nature and evolution of an idea* (Corrected edition). Edward Arnold.
- Khalidi, R., Anderson, L., Muslih, M. Y., & Simon, R. S. (1991). *The Origins of Arab Nationalism*. Columbia University Press.
- Marzai, A. (2023, July 7). Nasser's Ideology vs Practice: Postcolonial Critique of Egypt's Yemen Intervention. *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2023/07/07/nassers-ideology-vs-practice-postcolonial-critique-of-egypts-yemen-intervention/>
- Middle East Eye. (2022). *Why Nasser's legacy still preoccupies the Egyptian psyche*. Middle East Eye. <https://www.middleeasteye.net/big-story/egypt-nasser-legacy-still-preoccupies-psyche>
- Miscevic, N. (2001). Nationalism. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2023). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/nationalism/>
- Nasser, A. (1955). The Egyptian Revolution. *Foreign Affairs*, 33(2), 199–211.
<https://doi.org/10.2307/20031089>
- Nasser Youth Movement. (2022, May 10). *The legacy of Gamal Abdul Nasser.. Where did it go? Who squandered it?* Nasser Youth Movement.
<https://nasseryouthmovement.net/Abdul-Nasser-1675>
- Nutting, A. (1972). *Nasser*. New York : E. P. Dutton.
<http://archive.org/details/nasser000nutt>
- Ottaway, M. (2022). *Egypt and the Allure of Military Power* | Wilson Center.
<https://www.wilsoncenter.org/article/egypt-and-allure-military-power>
- Powers, K. E. (2022). Nationalisms in International Politics. In *Nationalisms in International Politics*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1515/9780691224589>
- Robby, H. M. F. (2020). Arab Nationalism: Past, Present, and Future. *Journal of Integrative International Relations*, 5(1), Article 1.

- <https://doi.org/10.15642/jiir.2020.5.1.1-32>
- Salem, S. (2020). *Anticolonial Afterlives in Egypt: The Politics of Hegemony*. Cambridge University Press.
- Samir, S., & Basyar, M. H. (2022). KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PASCA-ARAB SPRING. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), Article 2.
<https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1051>
- Sayigh, Y. (2019). *Egypt's Military Now Controls Much of Its Economy. Is This Wise?*
<https://carnegieendowment.org/posts/2019/11/egypts-military-now-controls-much-of-its-economy-is-this-wise?lang=en¢er=middle-east>
- Shehata, D. (2018, May 16). *Sixty Years of Egyptian Politics: What Has Changed?* The Cairo Review of Global Affairs. <https://www.thecairoreview.com/essays/sixty-years-of-egyptian-politics-what-has-changed/>
- Smith, A. D. (1987). *The Ethnic Origins of Nations*. B. Blackwell.
- Smith, M. (2024, June 26). *Military's role in economy muddies Egypt's debt plan*. AGBI.
<https://www.agbi.com/analysis/economy/2024/04/egypt-military-role-economy-counters-tax-targets/>
- Stephens, R. H. (1972). *Nasser: A Political Biography*. Simon and Schuster.
- Suleiman, Y. (2003). *The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology*. Georgetown University Press, c/o Hopkins Fulfillment Service, P.
- Sutherland, C. (2012). Nationalism in the 21st Century. *International Relations*.
- Wien, P. (2017). *Arab Nationalism: The Politics of History and Culture in the Modern Middle East*. Taylor & Francis.